

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PADA MASA GERAKAN ABDUL QAHAR MUDZAKKAR

Pradata Ardi Saputro¹

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹pradataardi.2021@student.uny.ac.id

Abstract. *South Sulawesi has its own role in Indonesia's national history. We can know that the Gowa kingdom is a large kingdom located in South Sulawesi which has a strong port and fleet. Abdul Qahhar Mudzakkar as a figure from Makassar had troops, namely the command of the overseas troops who succeeded in uniting guerrilla groups in South Sulawesi aimed at fighting the Dutch who were planning to regain control of the Sulawesi region. Furthermore, the fighters who were members of the KGSS group led by Abdul Qahhar Mudzakkar demanded that all troops be accepted unconditionally as members of the Indonesian Armed Forces. However, this request was not approved by the Indonesian government. This conflict grew bigger when this movement turned into the DI/TII movement in South Sulawesi. Abdul Qahhar Mudzakkar declared that this movement was part of Kartosuwiryo's DI/TII movement. This shows a change in ideology from Pancasila to become an Islamic ideology. Islam became the main foundation of the DI/TII movement in South Sulawesi. The Abdul Qahhar Mudzakkar movement has indeed caused an unfavorable situation in South Sulawesi. Various lines of life became affected by this rebellion. The social and economic life of the community is also affected. Other areas have been able to develop economically, South Sulawesi people are still busy with the rebellion movement of Abdul Qahhar Mudzakkar. The research method used is qualitative research with relevant document studies. This study uses four stages, namely source collection, source criticism, drawing conclusions, and writing research results. The results of this study are (1) to determine the process of the birth of the Abdul Qahhar Mudzakkar movement, (2) to determine the efforts to resolve the Abdul Qahhar Mudzakkar movement by the government of the Republic of Indonesia, (3) to determine the socio-economic conditions of the people of South Sulawesi during the Abdul Qahhar Mudzakkar movement.*

Keyword: Socio-Economic; Abdul Qahhar Mudzakkar Movement; DI/TII South Sulawesi

Abstrak. Sulawesi Selatan memiliki peranan tersendiri dalam sejarah nasional Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa kerajaan Gowa merupakan kerajaan besar yang terdapat di Sulawesi Selatan yang memiliki pelabuhan serta armada laut yang kuat. Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai tokoh dari Makassar mempunyai pasukan yakni komando pasukan seberang yang berhasil mempersatukan kelompok-kelompok gerilya di Sulawesi Selatan bertujuan untuk melawan Belanda yang rencananya akan menguasai kembali wilayah Sulawesi. Selanjutnya para pejuang yang tergabung dalam kelompok KGSS pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar menuntut agar seluruh pasukan dapat diterima tanpa syarat masuk menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Akan tetapi, permintaan ini tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia. Konflik ini berkembang menjadi lebih besar saat gerakan ini berubah menjadi gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Abdul Qahhar Mudzakkar mendeklarasikan gerakan ini merupakan bagian dari gerakan DI/TII Kartosuwiryo. Hal ini menunjukkan perubahan ideologi yang semula Pancasila menjadi ideologi Islam. Islam menjadi landasan utama dari gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar memang telah menimbulkan keadaan tidak kondusif di Sulawesi Selatan. Berbagai lini kehidupan menjadi terkena dampak pada pemberontakan ini. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pun menerima dampaknya. Wilayah lain sudah bisa berkembang secara ekonomi, Sulawesi Selatan masyarakatnya masih disibukkan dengan gerakan pemberontakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan empat tahap yakni pengumpulan sumber, kritik sumber, menarik kesimpulan, dan penulisan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses lahirnya gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar, (2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar oleh pemerintah Republik Indonesia, (3) Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan pada masa gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar.

Kata Kunci: Sosial Ekonomi; Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar; DI/TII Sulawesi Selatan



Copyright © 2023 The Author(s)
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)

PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa ini. Indonesia memulai babak baru menjadi sebuah negara yang merdeka. Namun, keadaan ini tak menjadikan Indonesia lepas dari pengaruh bangsa lain. Dengan kedatangan bangsa Belanda, situasi keamanan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Pemerintah Belanda seakan-akan belum ikhlas dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Agresi Militer Belanda terhadap wilayah-wilayah di Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan situasi negara Indonesia tidak langsung menjadi kondusif. Di berbagai kondisi terjadi gangguan keamanan, baik yang disebabkan oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. Upaya penguasaan Indonesia kembali oleh Belanda merupakan faktor dari luar. Sedangkan pemberontakan-pemberontakan oleh tokoh dalam negeri menjadi pendorong gangguan keamanan dalam negeri, contohnya gerakan Abdul Kahar Mudzakkar. Gerakan pemberontakan terhadap negara yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan karena Kahar menuntut agar KGSS dijadikan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya (Nasution, kaka alvian, 2017 : 66).

Sulawesi Selatan memiliki peranan tersendiri dalam sejarah nasional Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa kerajaan Gowa merupakan kerajaan besar yang terdapat di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan. Belanda menginginkan wilayah ini, sehingga muncul pertempuran antara Arung Palakka dengan Sultan Hassanudin. Kekalahan Sultan Hasanudin membawa dampak Makassar dikuasai oleh Belanda. Hal ini juga terjadi setelah Indonesia merdeka dimana Belanda datang kembali ke Makassar dan berusaha untuk menguasainya kembali.

Abdul Qahhar Mudzakkar mempunyai pasukan yakni komando pasukan seberang yang berhasil mempersatukan kelompok-kelompok gerilya di Sulawesi Selatan. Konferensi Maros menjadi dasar terbentuknya Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. KGSS muncul menjadi kelompok yang kuat dan memiliki banyak pasukan. Kelompok ini bertujuan untuk melawan Belanda yang rencananya akan menguasai kembali wilayah Sulawesi. Konferensi Meja Budar menjadi akhir dari pertikaian Indonesia dan Belanda. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dengan nama Republik Indonesia Serikat. Tentara Indonesia pun bias bernafas lega dengan adanya kesepakatan ini. Para pejuang telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah masalah yang tak kalah rumit. Masalah ini muncul dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Para pejuang yang tergabung dalam kelompok KGSS pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar menuntut agar seluruh pasukan dapat diterima tanpa syarat masuk menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Akan tetapi, permintaan ini tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia. Konflik ini berkembang menjadi lebih besar saat gerakan ini berubah menjadi gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Abdul Qahhar Mudzakkar mendeklarasikan gerakan ini merupakan bagian dari gerakan DI/TII Kartosuwiryo. Hal ini menunjukkan perubahan ideologi yang semula Pancasila menjadi ideologi Islam. Islam menjadi landasan utama dari gerakan DI/TII Sulawesi Selatan.

Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar memang telah menimbulkan keadaan tidak kondusif di Sulawesi Selatan. Berbagai lini kehidupan menjadi terkena dampak pada pemberontakan ini. Kehidupan social dan ekonomi masyarakat pun menerima dampaknya.

Wilayah lain sudah bisa berkembang secara ekonomi, Sulawesi Selatan masyarakatnya masih disibukkan dengan gerakan pemberontakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Berdasar latar belakang tersebut peneliti akan mengungkap bagaimana kondisi social ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan pada saat terjadinya pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sulawesi Selatan pada masa Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis. Penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, menarik kesimpulan, dan penulisan sejarah.

Langkah pertama yakni pengumpulan sumber, penulis mencari berbagai sumber sejarah yang relevan. Penelitian ini merupakan studi literatur terkait dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, dan internet. Langkah kedua yakni kritik, penulis menguji keabsahan sumber data apakah isi sumber relevan atau tidak. Langkah ketiga yakni menarik kesimpulan, memperoleh kesimpulan yang objektif berdasarkan pada fakta yang termuat dalam sumber sejarah. Langkah terakhir yakni penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah.

HASIL DAN DISKUSI

Gerakan Abdul Kahar Mudzakkar

Sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia pada awal kemerekaan berubah-ubah mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Adanya sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 ditandai dengan berkuasanya partai politik untuk menjalankan pemerintahan. Persaingan antar partai pun tak terhindarkan, sehingga tiada cabinet yang mempunyai umur panjang. Pemerintahan yang tidak stabil banyak faktor yang menorongnya. Indonesia sulit berkembang pada masa ini.

Abdul Qahhar Mudzakkar dilahirkan di kampong Luwu, Distrik Pinrang, Sulawesi Selatan pada 24 Maret 1921. Ia berasal dari lingkungan keluarga Bugis-Luwu yang dikenal memiliki keberanian tinggi. Keluarganya termasuk orang yang memiliki banyak uang dan memiliki kemampuan berdagang sehingga disegani di masyarakat.

Ayahnya rupanya mempunyai pemikiran jauh tentang kemajuan masa depan anaknya, Abdul Qahhar Mudzakkar disuruhnya merantau ke Jawa. Ia diminta melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat di Lanipa, tempat kelahirannya. Ia memilih kota Solo yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa dan memasuki Sekolah Muallimin yang dikelola oleh Muhammadiyah.

Pada bulan Mei 1943, untuk kedua kalinya Abdul Qahhar Mudzakkar meninggalkan tanah kelahirannya menuju Pulau Jawa. Ia menetap di tanah kelahiran istrinya, kota Solo. Setiba di kota itu, ia mendirikan sebuah perusahaan dengan nama "Usaha Semangat Muda" yang bergerak di bidang perniagaan. Tetapi kegiatannya di bidang perniagaan ini tidak hanya terbatas di sekitar kota Solo, melainkan juga ia menjalin kerjasama dengan rekan-rekan sekampungnya yang ada di Jakarta. Bersama kawan-kawannya ia membentuk Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS). Kemudian diubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS) yang anggotanya meliputi pemuda dari Sulawesi. Dalam melaksanakan kegiatannya secara

nasional, organisasi ini merupakan bagian dari Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang ketika itu berada di bawah pimpinan Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana." Sebagaimana diketahui Sukarni, Chaerul Saleh, Wikana dan Adam Malik adalah tokoh-tokoh yang merencanakan rapat besar untuk Komite van Aksi.

Karir Abdul Qahhar Mudzakkar dalam Angkatan Perang Republik Indonesia cukup baik ketika ia diberi kepercayaan menjadi Komandan TRI di Sulawesi Selatan. Ia merupakan Putra Sulawesi Selatan yang memiliki pangkat tinggi sejajar dengan tokoh lainnya yakni Mayor Ani Mattalatta. Oleh karena itu, kepemimpinannya menjadi dambaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pengangkatan Letnan Kolonel J. F. Warouw sebagai Komandan Brigade XVI dapat dikatakan sebagai kegagalan pertama bagi Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar untuk meraih jenjang tertinggi di dalam suatu komando pasukan pada jajaran kepemimpinan Tentara Republik Indonesia (TRI). Namun, kenyataan itu harus diterimanya. Oleh karena itu, kedudukan sebagai Wakil Komandan atau orang kedua di dalam Brigade XVI itu diterima dengan "setengah hati".

Rencana pengangkatan Lembong ditentang oleh Letkol Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar yang pasukan pasukannya memang merupakan terbesar jumlahnya di dalam brigade anak seberang ini. Ketika mendengar ren cana pengangkatan Letnan Kolonel Lembong sebagai Komandan Brigade XVI, maka Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar mengambil langkah-langkah untuk mencegah pasukannya menerima rencana itu. Kegagalannya meraih kedudukan Komandan Brigade XVI itu sekaligus juga menutup jalan karir yang sebelumnya nampak akan cemerlang, dalam bidang ketentaraan. Setelah penyerangan Agresi ke-2 yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Abdul Qahhar Mudzakkar melepaskan jabatannya sebagai wakil komandan Brigade XVI. Ia kemudian diberi tugas oleh Kolonel Bambang Supeno untuk membentuk Komando Seberang yang meliputi: Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku dan Sulawesi. Hal itu dilakukan pada bulan Oktober 1945 dan pimpinan Komando Seberang ini sekaligus diserahkan kepadanya. Watak kerasnya tidaklah pernah berubah sekalipun ia pemimpin pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan untuk kemudian menerima nasibnya di ujung senapan pasukan Siliwangi pada bulan Februari 1965. Tetapi tampaknya, mereka yang menjadi pemberontak memang terdiri dari orang-orang keras yang sangat sulit menerima kompromi. Kita melihat misalnya Kartosuwirjo yang merupakan pemimpin tertinggi (Imam) NII.

Dalam fungsinya sebagai pimpinan, nampak pula sikap kerasnya yang tidak mengenal kompromi. Karena sifat emosionalnya yang sangat egosentris, ia mudah tersinggung perasaannya karena ucapan-ucapan serta tindakan-tindakan orang lain. Ia biasanya menganggap ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan itu ditujukan kepada dirinya sendiri.. Ia tidak mudah percaya pada orang lain, dan kecurigaan yang dimilikinya pada orang lain biasanya bercampur dengan kebencian walaupun sifat itu tidak ditujukannya ke luar. Sehubungan dengan itu, Abdul Qahhar Mudzakkar dan para pengikutnya yang berasal dari Sulawesi Selatan, memang menguasai medan tempat gerakannya. Ia dan para pengikutnya telah menggunakan kemampuannya ini untuk mempengaruhi massa. Wataknya yang keras, nekad dan mampu melakukan penyesuaian sikap, justru menguntungkan di dalam mengendalikan rakyat setempat. Watak yang demikian berkaitan erat dengan sikap dan watak dari rakyat setempat.

Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar berkedudukan sebagai Komandan Komando Groep Seberang. Ia menegaskan salah seorang staf kepercayaannya, yaitu Letnan Satu Saleh Sjabban, untuk melakukan persiapan. Dalam usaha itu Letnan Satu Saleh Sjabban segera menghubungi komandan-komandan laskar sesampainya di Sulawesi Selatan, dan ternyata berhasil baik. Pada bulan Agustus 1949 di dalam suatu konferensi komandan-komandan laskar yang dilakukan di Maros, terbentuklah Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS), Organisasi baru kelaskaran ini digambarkan memiliki kekuatan sebanyak 10 batalyon. Dalam kenyataannya justru usul inilah yang menjadi permasalahan gerilya dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini berkembang menjadi benih yang tumbuh sebagai alasan pertentangan di antara pemerintah/Komandan Komando Teritorium VI Wirabuana dengan KGSS. Permasalahan timbul karena kedua belah pihak tidak dapat mem pertemukan keinginan-keinginan mereka. Pihak Komandan KGSS menginginkan agar penerimaan anggota gerilya yang tergabung dalam KGSS dila kukan secara utuh dan keseluruhan. KGSS ketika itu di wakili oleh Letnan Satu Saleh Sjabban. Artinya, semua anggota KGSS tanpa mempersoalkan persyaratan yang ada dapat diterima sebagai anggota APRI. Hal ini tidak dapat diterima oleh Komandan Komando TT VII/Wirabuana, karena menghendaki penerimaan anggota KGSS itu per batalyon. Bagaimanapun juga persyaratan-persya ratan untuk diterima sebagai anggota APRI, pada batas tertentu tetap akan diperlakukan.

Abdul Qahhar Mudzakkar berangkat ke Sulawesi Selatan bersama Letkol Mursito. Kemudian ia mengadakan perjalanan ke daerah-daerah pedalaman untuk menemui dan meminta keterangan dari para komandan batalyon KGSS dan anak buahnya. Kebetulan sebagian besar KGSS yang pernah menjadi anak buah Letkol Abdul Qahaar Mudzakkar di Jawa Timur atau di Yogyakarta Tetapi nampaknya hasil yang diperoleh Abdul Qahhar Mudzakkar dari perjalannya itu ialah bahwa para anggota KGSS tetap pada pendiriannya. Mereka menuntut menjadi anggota APRI(S) secara keseluruhan di dalam satu Brigade dengan komandannya Letkol Abdul Qahhar Mudzakkar. Setelah mengadakan perjalanan itu, ia kemudian melaporkan hasil pertemuannya dengan anggota KGSS di pedalaman kepada Kolonel Kawilarang tetapi diabaikan. Bahkan sebaliknya, di dalam rapat yang diadakan pada tanggal 1 Juli 1950 yang juga dihadiri oleh Abdul Qahhar Mudzakkar, Panglima mengeluarkan suatu dekrit yang menyatakan pembubaran KGSS sebagai organisasi kelasykaran gerilya. Inti dekrit yang dikenal dengan nama decreet Kawilarang, ter utama menyebutkan bahwa "KGSS dan organisasi gerilya di luar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan tantara. Sejak itulah Abdul Qahhar Mudzakkar bergerilya di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Ketika ia meninggalkan rapat, ia membuka dan meletakkan tanda pangkat letkol-nya.

Kolonel Kawilarang, sebagai Panglima TT VII/Wirabuana menolak tuntutan KGSS berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Tuntutan Abdul Qahhar Mudzakkar dan KGSS itu menyimpang dari dasar-dasar yang ditentukan pemerintah pusat yang menyebutkan (a) satuan satuan anggota pejuang yang ingin tetap dalam Angkatan Perang adalah setinggi-tingginya berbentuk batalyon; (b) satuan-satuan tersebut akan

menjadi bagian dari Brigade Hasanuddin, dengan ketentuan ini jelas tidak disebut akan menjadi Brigade hasanuddin; dan (c) tuntutan daerah tugas oleh suatu pasukan tentara belum pernah terjadi di Indonesia, kecuali oleh tentara Pemberontak Abdul Aziz yang mena makan diri tentara RMS dan oleh APRA yang dulu di pimpin oleh Westerling. Sebaliknya Abdul Qahhar Mu dzakkar dan pimpinan bawahannya di dalam KGSS ber pendapat bahwa tuntutannya wajar. Disebutkan bahwa tuntutannya terlebih dahulu telah diadakan di propinsi lainnya, seperti di Jawa dan Sumatra.

Jika kita memperhatikan proses pertumbuhan Gerakan "Pemberontakan Abdul Qahhar Mudzakkar itu, nampak ada dua tahap untuk menjadikan Islam sebagai Ideologi gerakannya. Tahap pertama 1951-1953 (sampai 7 Agustus 1953, saat proklamasi penggabungan gerakan TKR dengan gerakan DI/THI mendirikan NII di Jawa Barat). yang oleh Abdul Qahhar Mudzakkar disebut massa pengga langan dan masa peralihan."Tahap kedua 1953-1964 yang oleh Abdul Qahhar Mudzakkar disebut menggerakkan revolutie Islam. Dari kedua tahap ini sebenarnya dua jenis ideologi, yaitu agama, khususnya Islam dan Pancasila pernah menjadi pegangan gerakan yang bersumber dari gerilya dalam perang Kemerdekaan. Karena itu Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai pemimpin mempunyai pandangan atau tafsiran terhadap kedua jenis ideologi tersebut.

Ketika KGSS bersama Abdul Qahhar Mudzakkar gagal diresmikan sebagai anggota APRI, maka ia meninggagalkan tempat-tempat penampungannya. Kemudian ia masuk hutan melanjutkan perlawanan pemberontakannya terhadap Pemerintah RI pimpinan Presiden Soekarno. Tetapi dalam tahap pertama (1950-1953) yaitu masa penggalangan dan masa peralihan yang ketika itu bernama CTN dan kemudian TKR, ia justru menggunakan Undang-undang Dasar 1945/Pancasila sebagai landasan ideologi gerakannya. Untuk mengorganisasi massa pengikutnya, Abdul Qahhar Mudzakkar membentuk Partai Pan tjasila Indonesia (PPI) seperti yang telah disinggung pada sub-bab di atas. Dalam rangka itu diperlukan pula suatu landasan ideologi yang menjadi pegangan gerak dari partai ini.

Jika kita berpindah kepada pembicaraan tentang agama maka di dalam tabiran Abdul Qahhar Mudzakkar, agama yang mampu memperbaiki situasi masyarakat dunia adalah agama Islam Masyarakat digambarkan olehnya telah mengalami "kerusakan dengan menyebutkan telah "tjen tang perenang Golongan masyarakat dunia yang ada dewasa ini, seperti liberalisme, komunisme gadungan dan golongan dunia agama (di luar agama Islam) justru merupakan faktor-faktor yang merusak masyarakat dunia.

Hal yang sama juga telah diberikan oleh seorang tokoh gerakan DI/TII lainnya, yaitu Hasan Muhammad Di Tiro. Di dalam salah satu buku karangannya ia memberikan uraian analisis terhadap Pancasila dari sudut tafsiran filsafat dan ideologi. Diulasnya Pancasila berdasarkan sila per sila dengan menggunakan tafsiran filsafat dan ideologi. Ia sampai pada pendapat bahwa Pancasila tidak dapat di sebut sebagai filsafat maupun ideologi. Di dalam tafsiran para pendukung gerakan DI/TII, Pancasila tidak memiliki kekuatan moral untuk menjadi dasar dan ideologi negara. Bahkan mereka berpikiran tidak hanya itu. Dalam pandangan mereka, Pancasila akan mem bahayakan kedudukan keagamaan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Jika Pancasila dibiarkan tersebar di dalam masyarakat, maka umat Islam akan murtad.

Upaya Penyelesaian Dari Pemerintah

Setelah melalui berbagai langkah, terjadi kesepakatan dimana para anggota KGSS diangkat menjadi anggota Corps Cadangan Nasional (CTN). Setelah masuk CTN, akan diproses menjadi anggota APRI sesuai keinginan Abdul Qahhar Mudzakkar dan kelompoknya. Pelantikan menjadi anggota CTN dilaksanakan pada 1 Januari 1951. Adanya isu pertentangan antara APRIS CTN ini menyebabkan Abdul Qahhar Mudrakkar mengeluarkan suatu pernyataan yang intinya menyatakan adanya perlambatan penyelesaian CTN selama ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pembentukan Brigade Hasanuddin. Ternyata memang dalam periode April Juli 1951 telah terjadi kembali ketegangan dan pertentangan di antara APRIS dengan CTN karena kehendak cara penyelesaian yang berbeda dari kedua belah pihak. Pihak APRIS tetap menghendaki peresmian CTN menjadi anggota APRIS dilakukan secara batlyon per batalyon dan tidak dalam kesatuan utuh satu brigade. Sebaliknya pihak Abdul Qahhar Mudrakkar/pimpinan CTN menghendaki mereka dilantik sebagai anggota APRI secara utuh dalam satu Brigade yakni Brigade Hasanuddin.

Dalam perkembangannya gerakan pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar telah melangkah untuk memperkuat dirinya dengan mengadakan reorganisasi pasukan-pasukannya. Dalam rangka itu, ia telah mengganti nama gerakannya dari CTN menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat Komando Pasukan Hasanuddin. Gerakan itu lebih dikenal dengan TKR. Abdul Qahhar Mudzakkar tampaknya memiliki pikiran jangka panjang untuk menunjang gerakannya itu, antara lain dengan mengadakan kaderisasi di antara mereka. Ia telah memerintahkan kepada Andi Tenriadjeng untuk membentuk sebuah sekolah kader di Rong kong Atas dan pada waktu itu telah mempunyai kader sebanyak 410 orang. Mereka dididik di 2 sekolah kader di Rongkong Atas dan Masamba yang masing-masing mem punyai 4 orang guru yang didatangkan dari Jawa pada bulan Maret 1952.

Pemerintah tidak tinggal diam dengan adanya gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Berdasarkan pernyataan PM Sukiman itu Kolonel Kawilarang mengeluarkan suatu perintah operasi yang diberi nama OPERASI MERDEKA. Selanjutnya, Kepala Staf TT VII/Wirabuana menempatkan daerah Sulawesi Selatan dan daerah KMKG Makassar sebagai daerah operasi. Sejak itu keadaan Sulawesi Selatan berada dalam keadaan genting dan berbahaya. Demikian genting dan berbahayanya dapat diketahui dengan adanya instruksi dari Kepala Staf TT VII/Wirabuana. Instruksi itu ditujukan kepada anggota-anggota APRI dan polisi, yang mengatur cara duduk di atas kendaraan jika bertugas ke luar kota. Dalam instruksi itu ditentukan bahwa jika anggota APRI dan polisi akan keluar kota, harus berjumlah sedikit-sedikitnya 5 orang dengan senjata lengkap.

Kolonel Gatot Subroto membentuk satuan komando operasi militer dengan nama Halilintar. Komandan operasinya adalah Letnan Kolonel J. F. Warouw yang juga berkedudukan sebagai Kepala Staf TT VII/Wirabuana. Di dalam surat Perintah Operasi Nr. 20050/7/VIII/52 bersama lampirannya telah ditentukan pelaksanaannya. Hal itu dilakukan karena jangka waktu penyelesaian damai telah terlewati, dan Abdul

Qahhar Mudzakkar bersama pasukannya tidak mau memenuhi jalan damai. Untuk itu maka terpaksa ditempuh jalan penyelesaian dengan "tindakan keras".

Pihak Pemerintah RI nampaknya tidak mau lagi membuka jalan damai yang selama ini terjadi dengan uluran tangan melalui perundingan. Operasi Tumpas yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Indonesia Timur (Koandait), yang mempunyai Komando Tempur dengan nama Komando Operasi Kilat yang dipimpin langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Andi Muhammad Yusuf. Dilihat dari sudut kepemimpinan komando operasi militer, maka komando operasi Tumpas-Kilat ini mempunyai sifat khusus. Selama ini, yaitu dalam periode operasi Kodam XIV/Hasanuddin, telah diadakan sekian kali reorganisasi dari sekian banyak komando operasi. Tetapi komando itu tidak pernah langsung dipimpin oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, melainkan oleh pejabat yang lebih rendah. Letkol Andi Sose yang telah berkali-kali menjadi komandan dari beberapa komando operasi adalah pejabat yang paling tinggi kedudukannya yang pernah memimpin komando operasi yang dimaksud.

Dengan adanya kepastian tempat persembunyian Abdul Qahhar Mudzakkar, pasukan Operasi Kilat pun mengatur penyerangan terhadap sasaran itu. Penyerangan itu berlangsung sangat cepat dan di tengah-tengah desing peluru kedua belah pihak, Kopral Sadeli, dari Siliwangi melihat seseorang memegang sebuah granat tangan. Orang itu meloncat dari sebuah gubuk. Ternyata orang ini adalah Abdul Qahhar Mudzakkar. Pada mulanya anggota penyergap ini mau menangkap sasarnya secara hidup, tetapi maksud itu diurungkannya, karena ternyata sasarnya menggenggam sebuah granat tangan. Dengan cepat kopral Sadeli membidik sasaran yang sudah dipas tikannya adalah orang yang dicarinya selama ini. Dalam operasi itu, kepada setiap anggota penyergap diberikan foto Abdul Qahhar Mudzakkar.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Gerakan Abdul Kahar Mudzakar

Berdasarkan konvensi London 1814 dan Traktat London 1824, Pemerintah Hindia Belanda dituntut melaksanakan perdagangan bebas sebagai syarat pengembalian Nusantara dari tangan Inggris (Poelinggomang, 2016). Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia yang sekaligus juga pernyataan berdirinya Negara RI, mela hirkan konsekuensi logis di bidang administrasi ke negaraan. Artinya wilayah negara RI secara administrasi harus dibagi ke dalam beberapa wilayah yang lebih kecil yaitu tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Pada waktu itu diputuskan oleh Pemerintah RI untuk membagi wilayah negara yang baru berdiri ini menjadi delapan propinsi; salah satu dari delapan propinsi yang dimaksud ialah Propinsi Sulawesi. Pembentukan Propinsi Sulawesi ini kemudian juga disusul oleh penunjukan Dr. G. S. S. J. Ratulangie sebagai gubernur pertama.

Kota Makassar dan Pare-pare dikenal sebagai kota pelabuhan yang diberi status sebagai Kotamadya. Wilayah lainnya menjadi kabupaten yakni Gowa, Bone, dan Luwu. Pemimpin kabupaten disebut bupati yang diangkat berasal dari keluarga kerajaan di daerah tersebut. Para penguasa kerajaan tradisional bergelar Andi. Letak Sulawesi Selatan menunjukkan propinsi ini mempunyai daerah pantai yang cukup luas, sehingga wilayah perairannya pun luas. Di propinsi ini terdapat Teluk Bone dan Selat Makassar-disamping berbatasan dengan Laut Flores. Dengan posisi yang demikian dapat dimaklumi jika di antara 23 daerah tingkat II yang dimiliki kinya, terdapat 20 daerah yang mempunyai daerah pantai dan hanya 3 daerah tingkat II yang

tidak mempunyai daerah pantai, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Soppeng. Selain mempunyai daerah pantai yang demikian luas, Propinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai daratan dan daerah pegunungan yang luas disamping wilayah dataran rendah. Hal ini mengakibatkan adanya jalan setapak yang amat penting dalam perkembangan gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Gerakan ini memanfaatkan keadaan alam untuk bersembunyi dan melawan pemerintah dalam gerakannya memperjuangkan ideologi Islam.

Keadaan geografis Sulawesi Selatan menyediakan potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di budang sosial-ekonomi. Faktor ekologis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir misalnya gelombang laut, pasang surut, termasuk flora fauna yang menjadi objek pencaharian (Utina, Ramli dkk, 2018 :9). Namun dalam perkembangannya, masyarakat belum mampu memanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan membuat mereka hanya mengolah sebagian potensi alam tersebut. Bidang pertambangan belum tergarap secara maksimal, kecuali tambang nikel di desa Pomala'a. Sulawesi selatan juga dikenal memiliki banyak pelabuhan peragangan. Pada saat terjadinya gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar, terdapat pelabuhan yang digunakan untuk memperoleh senjata. Selain itu, untuk menyelundupkan hasil bumi yang dijual ke daerah lain untuk kepentingan gerakan DI/TII. Gerakan ini tidak dapat terlepas dari potensi alam yang dimiliki Sulawesi selatan dalam memperbesar gerakannya.

Di dalam keadaan yang tidak tenram karena gangguan keamanan gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar, Sulawesi Selatan tetap bertahan sebagai salah satu penghasil padi dan atau beras yang terpenting di Indonesia dan sampai sekarang pun masih tetap potensial. Disamping beras, daerah ini juga sangat potensial untuk menghasilkan kopra. Di dalam hubungannya dengan situasi di Sulawesi Selatan dalam periode gerakan DI/ TII, 1950-1965, kedua hasil ini mempunyai kedudukan yang cukup "khas". Hasil ini tidak hanya diperhitungkan karena penentu sektor ekonomi-perdagangan dan kebutuhan sehari-hari, melainkan juga mempunyai posisi di bidang politik.

Walaupun dikatakan bahwa daerah itu disebut sebagai penghasil beras dan kopra yang cukup banyak jumlahnya, namun dalam waktu tertentu, pernah juga terjadi kekurangan beras untuk daerah-daerah tertentu. Kekurangan beras yang seperti itu tentu saja diikuti oleh naiknya harga beras. Pada tahun-tahun berlangsungnya gerakan DI/TII di daerah itu, kota-kota tertentu pernah kekurangan beras, termasuk Kotamadya Makassar. Juga pernah terjadi banyak pabrik kelapa di Makassar untuk sementara waktu ditutup karena kurangnya bahan baku pabrik-pabrik, yaitu kopra.

Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar secara langsung membawa dampak sosial-ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Akibat gerakan ini, perkembangan ekonomi masyarakat tidak maksimal karena banyak lahan yang digunakan untuk pertempuran. Lahan hancur sehingga masyarakat tidak dapat panen hasil bumi. Dengan ekonomi yang tidak maksimal, membuat kemiskinan melanda di Sulawesi Selatan. Pemerintah kurang tanggap dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat

karena focus pada penyelesaian pemberontakan. Hal ini justru membuat masyarakat memihak ke gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar.

KESIMPULAN

Abdul Qahhar Mudzakkar mempunyai pasukan yakni komando pasukan seberang yang berhasil mempersatukan kelompok-kelompok gerilya di Sulawesi Selatan. Konferensi Maros menjadi dasar terbentuknya Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Konflik ini berkembang menjadi lebih besar saat KGSS ini berubah menjadi gerakan DI/TII Sulawesi Selatan. Abdul Qahhar Mudzakkar mendeklarasikan gerakan ini merupakan bagian dari gerakan DI/TII Kartosuwiryo. KGSS bersama Abdul Qahhar Mudzakkar gagal diresmikan sebagai anggota APRI, maka ia meninggagalkan tempat-tempat penampungannya. Kemudian ia masuk hutan melanjutkan perlawanan pemberontakannya terhadap Pemerintah RI pimpinan Presiden Soekarno.

Setelah melalui berbagai langkah, terjadi kesepakatan dimana para anggota KGSS diangkat menjadi anggota Corps Cadangan Nasional (CTN). Setelah masuk CTN, akan diproses menjadi anggota APRI sesuai keinginan Abdul Qahhar Mudzakkar dan kelompoknya. Dalam perkembangannya gerakan pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar telah melangkah untuk memperkuat dirinya dengan mengadakan reorganisasi pasukan-pasukannya. Pemerintah tidak tinggal diam dengan adanya gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Pihak Pemerintah RI nampaknya tidak mau lagi membuka jalan damai yang selama ini terjadi dengan uluran tangan melalui perundingan. Kolonel Kawilarang mengeluarkan suatu perintah operasi yang diberi nama operasi Merdeka. Selanjutnya, Kolonel Gatot Subroto membentuk satuan komando operasi militer dengan nama Halilintar untuk menumps gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar. Pada Akhirnya, operasi militer piminan Andi Muhammad Yusuf dapat melumpuhkan Abdul Qahhar Mudzakkar.

Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar berada di Sulawesi Selatan yang dikenal mempunyai daerah pantai yang cukup luas, sehingga wilayah perairannya pun luas. Di propinsi ini terdapat Teluk Bone dan Selat Makassar-disamping berbatasan dengan Laut Flores. Selain mempunyai daerah pantai yang demikian luas, Propinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai daratan dan daerah pegunungan yang luas disamping wilayah dataran rendah. Sulawesi selatan juga dikenal memiliki banyak pelabuhan peragangan. Pada saat terjadinya gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar, terdapat pelabuhan yang digunakan untuk memperoleh senjata. Selain itu, untuk menyelundupkan hasil bumi yang dijual ke daerah lain untuk kepentingan gerakan DI/TII. Gerakan ini tidak dapat terlepas dari potensi alam yang dimiliki Sulawesi selatan dalam memperbesar gerakannya.

Di dalam keadaan yang tidak tenram karena gangguan keamanan gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar, Sulawesi Selatan tetap bertahan sebagai salah satu penghasil padi dan atau beras yang terpenting di Indonesia dan sampai sekarang pun masih tetap potensial. Disamping beras, daerah ini juga sangat potensial untuk menghasilkan kopra. Di dalam hubungannya dengan situasi di Sulawesi Selatan dalam periode gerakan DI/TII, 1950-1965, kedua hasil ini mempunyai kedudukan yang cukup "khas". Hasil ini tidak hanya diperhitungkan karena penentu sektor ekonomi-perdagangan dan kebutuhan sehari-hari, melainkan juga mempunyai posisi di bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Mattalioe. (2006). *Petualangan Qahhar Madzakkar*. Yogyakarta: Ombak.
Gonggong, Anhar. (1992). *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*.
Jakarta: Gramedia Widiasarana.

- Hamid, Abd. Rahman. (2008). *Qahhar Mudzakkar di Persimpangan Jalan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hamid, Abd Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Harvey, Barbara S. (1989). *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Latif, Abd. (2014). Para Penguasa Ajatapparang. Refleksi Sejarah Sosial Orang Bugis. Yogyakarta: Ombak.
- Nasution, Kaka Alvian. 2017. Sang Prajurit pemberani. Diva Press.
- Poelinggomang, edward L. 2016. Makassar abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Gramedia: jakarta.
- Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
- Wulandari Eka, Jumadi, La Malihu. (2020). Aktifitas Gerombolan DI/TII dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sidrap 1950-1965. *Pemikir Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan Vol 7, No 2, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM. hlm.1-13*